

Pengaruh Pinjaman Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan

Galuh Jati Asmara¹, Gea Dwi Asmara^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan²

galuhjatiasmara@mail.ugm.ac.id¹; gea@ep.uad.ac.id^{2*}

Received 09 Agustus 2024 | Revised 27 Mei 2025 | Accepted 05 October 2025

*Korespondensi Penulis

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun keterbatasan kapasitas fiskal masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah. Salah satu alternatif pembiayaan pembangunan adalah melalui pinjaman daerah, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pinjaman daerah sebagai instrumen fiskal di tengah keterbatasan APBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017–2019. Data yang digunakan merupakan data panel sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, PAD dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan. Nilai R-square sebesar 0,765901 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 76%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Pinjaman Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Jumlah Penduduk; Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

The implementation of regional autonomy aims to improve the welfare of the community, but limited fiscal capacity is still a major challenge for local governments. One alternative to financing development is through regional loans, which are expected to encourage economic growth. This research is important because it provides an empirical picture of the effectiveness of regional loans as a fiscal instrument amidst the limitations of the APBD. The purpose of this study is to analyze the effect of regional loans, regional own-source revenue (PAD), and population on district / city economic growth in South Kalimantan Province for the 2017-2019 period. The data used is secondary panel data from local government financial reports that have been audited by BPK. The results showed that regional loans had no significant effect on economic growth. In contrast, PAD and population have a positive and significant effect. The R-square value of 0.765901 indicates that the three independent variables are able to explain the variability of economic growth by 76%, while the rest is influenced by other factors outside this research model.

Keywords: Regional Loan; Regional Own-source Revenue; Population; Economic Growth

PENDAHULUAN

Dalam proses pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah masih menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah kemampuan pembiayaan terhadap pembangunan daerah yang masih terbatas. Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan adalah melalui pinjaman daerah, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif

sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah diperlukan ketika terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah, meskipun transfer antarpemerintah telah diperhitungkan (Sabilla & Kirana, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yang dimaksud dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Dana dari pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai segala proyek dan pembangunan di daerah, baik bersifat fisik ataupun non fisik. Namun mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Pemerintah Pusat melakukan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal nasional telah menetapkan batas-batas dan rambu-rambu aturan terkait pinjaman daerah.

Pinjaman yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi adalah yang bersumber dari: 1) Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri; 2) Pemerintah Daerah lain; 3) Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 5) Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pinjaman daerah perlu dilakukan dengan tujuan antara lain pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena relatif terbatasnya penerimaan pemerintah daerah dan perusahaan daerah (BUMD), kemudian pinjaman daerah juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai sarana dan prasarana khususnya proyek yang bisa menghasilkan penerimaan daerah (*cost recovery project*) karena kebutuhan akan sarana dan prasarana pembangunan di daerah cukup besar. Dengan menggunakan dana pinjaman, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan di atas kapasitas pendapatan yang dimiliki untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada proyek-proyek strategis yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan belanja konsumen (Lestari et al., 2025). Namun yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana pinjaman adalah besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk mengembalikan pinjaman, sehingga tidak menjadi beban bagi keuangan daerah di masa-masa berikutnya (Manuhutu, 2013). Hal itu disebabkan karena penggunaan dana pinjaman bila tidak dilakukan hati-hati berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya pada masa yang akan datang (Abdurohim, 2022).

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia terdiri atas 13 daerah kabupaten/ kota yang otonom. Selama beberapa tahun terakhir sebagaimana daerah lain, 13 daerah kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan terus berupaya membangun infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasi Pendapatan Asli Daerah. Namun kemampuan keuangan 13 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan tersebut mayoritas masih belum mengalami surplus dalam APBD-nya atau kondisinya sering disebut dengan defisit. Dalam teori pengelolaan keuangan, diketahui bahwa jika suatu institusi mengalami defisit bisa jadi hal tersebut adalah defisit yang direncanakan karena melihat ada manfaat lebih besar yang dapat diperoleh dari anggaran belanja, misalkan untuk membangun prasarana layanan publik seperti rumah sakit, sementara pendapatan daerah tidak mampu mencukupi untuk penganggarannya. Dengan memperhatikan memenuhi ketentuan prinsip dan syarat-syaratnya, maka pinjaman daerah biasanya menjadi solusi cepat untuk mencukupi pendanaannya. Aliran klasik berpendapat bahwa pinjaman publik dapat menghambat pembangunan karena pengeluaran pemerintah dianggap tidak produktif. Sebaliknya, aliran Keynesian berpendapat bahwa pinjaman daerah dapat berfungsi sebagai fondasi untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan dapat meningkatkan produktivitas (Ilmiddaviq, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kiranya perlu untuk dilakukan penelitian terkait pengaruh pinjaman daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di lingkup provinsi Kalimantan Selatan. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan

jumlah penduduk. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek utama. Pertama, dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran pembiayaan daerah, khususnya pinjaman daerah, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Kedua, dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan fiskal dalam merumuskan strategi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan mengidentifikasi sejauh mana efektivitas pinjaman daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat membantu daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, terutama dalam situasi defisit anggaran yang memerlukan alternatif pembiayaan yang efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berupa data panel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LHP) dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota selama periode 2017–2020. Laporan tersebut merupakan data resmi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan data dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh BPK. Variabel dependen dalam penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pinjaman daerah merupakan variabel independen. Sementara itu, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software Eviews. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah, dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan menggunakan persamaan $Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3+\epsilon$.

HASIL dan PEMBAHASAN

Analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan data panel. Dalam menggunakan data panel maka diharuskan menentukan model mana yang terbaik untuk digunakan pada pengujian selanjutnya dengan menggunakan uji chow dan uji hausman sebagai berikut :

Uji chow

Tabel 1. Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|---------|--------|
| Cross-section F | 45.062178 | (12,23) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 124.765283 | 12 | 0.0000 |

Sumber: BPK diolah, 2022

Uji Hausman

Tabel 2. Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 18.981699 | 3 | 0.0003 |

Sumber: BPK diolah, 2022

Tabel 1 dan 2 merupakan hasil uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section F sama sama bernilai $< \text{Alpha } 0,05$, yang artinya bahwa **Fixed Effect Model** lebih baik digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Regresi FEM

Tabel 3. Hasil Regresi FEM

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 195.7001 | 44.88802 | 4.359740 | 0.0002 |
| X1 | 0.000718 | 0.046557 | 0.015432 | 0.9878 |
| X2 | 0.297775 | 0.142342 | -2.091973 | 0.0477 |
| X3 | 14.52234 | 3.636587 | -3.993399 | 0.0006 |



Effects Specification

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.765901 | Mean dependent var | 4.965128 |
| Adjusted R-squared | 0.743663 | S.D. dependent var | 1.088018 |
| S.E. of regression | 0.258247 | Akaike info criterion | 0.422642 |
| Sum squared resid | 1.533901 | Schwarz criterion | 1.105129 |
| Log likelihood | 7.758479 | Hannan-Quinn criter. | 0.667512 |
| F-statistic | 43.43381 | Durbin-Watson stat | 2.572231 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Dalam penelitian ini, hasil dari Uji *Chow* dan Uji *Hausman* menunjukkan bahwa model yang terpilih yaitu *Fix Effect Model* (FEM). Persamaan regresi dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

$$PTE_{it} = 195.7001 + 0.000718 Pdit + 0.297775 PADit + 14.52234 Jpit + \epsilon_{it}$$

Persamaan model diatas memiliki nilai konstanta = 195.7001, Apabila variabel pinjaman daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk tetap atau konstan, maka pertumbuhan ekonomi akan ada sebesar 195.7001

Uji Statistik F

Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi F pada tingkat 5%. Hasil pengujian statistik F menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, maka persamaan pada model penelitian dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis selanjutnya, serta model tersebut cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa proporsi pinjaman daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil pengujian statistik t ditunjukkan pada tabel dan dijelaskan sebagai berikut:

Nilai koefisien variabel pinjaman daerah sebesar 0.000718 dan nilai probability dari variabel pinjaman daerah sebesar 0.9878. Nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ($0.9878 > 0,05$), maka H1 tidak terdukung, yang berarti pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Kalimantan Selatan pada tahun 2017-2020.

Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah 0.297775 dan nilai probability dari variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.0477. Nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ($0.0477 < 0,05$), maka H1 terdukung, yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Kalimantan Selatan pada tahun 2017-2020.

Nilai koefisien variabel jumlah penduduk 14.52234 dan nilai probability dari variabel jumlah penduduk sebesar 0.0006. Nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau ($0.0006 < 0,05$), maka H1 terdukung, yang berarti jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Kalimantan Selatan pada tahun 2017-2020.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Hasil R-squared

| | |
|-----------|----------|
| R-squared | 0.765901 |
|-----------|----------|

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengatahui besarnya kontribusi variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen (Winarno, 2017). Pada tabel diatas, didapatkan nilai R-square sebesar 0.765901. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel proporsi pinjaman daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah penduduk mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 76%, sedangkan sisanya 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.



Pembahasan

Tabel 5. Hasil Pembahasan

| Variabel | Koefisien | Probabilitas | Keterangan |
|----------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Pinjaman daerah (X1) | 0,000718 | 0,9878 | Tidak Signifikan |
| PAD (X2) | 0,297775 | 0,0477 | Signifikan Positif |
| Jumlah penduduk (X3) | 14,52234 | 0,0006 | Signifikan Positif |

Pengaruh Pinjaman Daerah (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel pinjaman daerah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel X1 memiliki koefisien sebesar 0,000718 dengan nilai probabilitas sebesar $0,9878 > 0,05$, sehingga variabel pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini menunjukkan bahwa ketika Pinjaman Daerah meningkat 1 rupiah, tidak akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Oktaviani (2018); Akbar (2015); Zend (2022). Temuan dalam penelitian Zend (2022) menunjukkan bahwa peningkatan utang publik daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa disertai kebijakan pendukung yang tepat. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan APBD mengandung risiko krisis fiskal yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, belanja yang dibiayai dari utang harus diarahkan pada pengeluaran produktif dan strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini bertentangan oleh hasil penelitian yang dilakukan Dwitya (2024) mengatakan bahwa pinjaman daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Variabel PAD memiliki koefisien sebesar 0,297775 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0477. Hubungan ini menunjukkan bahwa ketika PAD meningkat 1 rupiah maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,297775% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riska dkk, (2013); Eka Putri, (2015); Alvaro, (2022) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing sebagai wujud desentralisasi. Peningkatan PAD yang diterima oleh daerah akan menambah dana yang dimiliki pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menggali dan mengoptimalkan potensi daerah lebih efektif (Alvaro, 2022). Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian dari Ihsan (2021); Billah & Wijaya (2022); Paat et al., (2019) yang menyatakan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Hasil penelitian variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan penduduk adalah positif signifikan dengan nilai koefisien 14,52234 dan probabilitas $0,0006 < 0,05$. Besarnya pengaruh itu dapat dijelaskan jika terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 ribu jiwa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 14,52234 dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) di Provinsi Aceh dan penelitian Darma (2021) Kabupaten Tebo bahwa hasil yang diperoleh jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti jika jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Hasil ini sesuai dengan teori Adam Smith yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada peningkatan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, akan terjadi peningkatan output dan hasil produksi (Arianto et al., 2015). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Sari & Fisabilillah (2021) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa lonjakan jumlah penduduk yang

tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan penyediaan pangan serta fasilitas pendukung justru dapat memperburuk kondisi perekonomian.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu bahwa pinjaman daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk dapat menjadi salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Implikasi penelitian ini yaitu, meskipun pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman, namun di dalam melakukan pinjaman harus diperlukan kajian lebih lanjut tentang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman tersebut, agar jumlah pinjaman yang diperoleh tidak memberatkan keuangan daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber keuangan sesuai dengan keinginan daerah maka sumber dana pinjaman ini harus betul-betul digunakan untuk mempercepat proses pembangunan daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah sendiri.

Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel utama, sehingga belum mencakup faktor lain seperti belanja modal atau kondisi institusional yang juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan daerah, sehingga bergantung pada kelengkapan dan akurasi data sekunder. Selain itu, metode regresi yang digunakan hanya menunjukkan hubungan antarvariabel, bukan hubungan sebab-akibat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim, A. (2022). Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsukensinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah di Jawa Barat (Studi Kasus Pinjaman & Pendapatan Daerah vs APBD 2015-2021). *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 19(2), 19–39. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v19i2.253>

Akbar, R. (2015). Local government debt and regional growth in Indonesia. *Proceedings - 21st International Congress on Modelling and Simulation, MODSIM 2015*, 980–986. <https://doi.org/10.36334/modsim.2015.e2.akbar>

Alvaro, R. (2022). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dbh, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 256–276. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.132>

Arianto, C. E., Sumarsono, S., & Adenan, M. (2015). The Influence Of The Population and Unemployment To Economic Growth Jember District. *Artikel Il Miah Mahasiswa*, 1(4), 1–6.

Billah, H. M., & Wijaya, R. S. (2022). Pengaruh PAD, DAU, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2437–2447.

Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. *Jurnal Citra Ekonomi*, 2(1), 1–12.

Dwitya, W. (2024). *Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pinjaman Daerah sebagai Pembiayaan Utang Daerah*. 4, 7044–7057.

Eka Putri, Z. (2015). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 5(2), 173–186.

Ihsan, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI*, 3(2), 26–39. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v3i2.181>

Ilmiddaviq, M. B. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 134–147. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/248>

Lestari, R. I., Wardono, B., Handajani, M., Supari, S., Juniati, H., Sunarno, M. T. D., & Prayogi, E.

(2025). The interplay of road infrastructure and regional finance in driving economic growth: Insights from East Kalimantan. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100444. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100444>

Manuhutu, Y., & Louhenapessy, D. J. (2013). Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan dan Variabel-variabel Makro Ekonomi Yang Mempengaruhinya Di Kota Ambon. *Ekonomi Keuangan*.

Oktaviani, A. N. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 305–313. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25264>

Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumate, V. A. (2019). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Di Kota Bitung. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAK*, 1–10.

Riska, A. A. I. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*.

Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 12–22.

Safitri, I. (2016). Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 56–65.

Sari, D. P., & Fisabilillah, L. W. perdini. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Banyuwangi. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 218–228. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43606>

Winarno, W. W. (2017). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*. UPP STIM YKPN.

Zend, A. S. (2022). Utang Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i4.526>